

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Abdullah. 2021. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badriyah Khaleed. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggono. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Dian Aries Mujiburohman. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Yogyakarta: STPN Press.
- Faisal Santiago. Natsir Asnawi. 2024. *Pengantar Teori Hukum Dasar-Dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Jakarta: Kencana.
- Farah Syah Rezah. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Social Politic Genius.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana.
- Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Fence M. Wantu. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia
- Heniy Astiyanto. Ismantoro Dwi Yuwono. 2013. *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Jeremy Bentham. 1871. *Teori Perundang-Undangan*. (terjemahan Nurhadi, M.A). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi. Prasetyo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kadaruddin. 2021. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Lukman Santozo Az. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi (Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi)*. Yogyakarta: IAIN Po PRESS.
- Muhammad Junaidi. 2016. *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum)*. Malang: Setara press.
- Nurul Qamar. Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Romi Librayanto. 2022. *Ilmu Negara (Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Riawan Tjandra. 2023. *Hukum Keuangan Negara*. Depok: PT Kanisus.

Soerjono Soekanto. 2022. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sukarno Aburaera. Muhadar. Maskun. 2010. *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*. Makassar: Pustaka Refleksi

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Pres. hlm. 176

Titin Rohayatin. 2023. *Teori Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Zairin Harahap. 2023. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Andi Bau Inggit AR. 2019. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal Restorative Justice. Volume 3. Nomor 1.

Alwi Jaya. Elvi Susanti. 2022. *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Tata Usaha Negara*. Indonesia Journal Off Criminal Law. Volume 4. Nomor 1.

Enrico Simanjuntak. 2019. *Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun Mahkamah Agung.

Galih Orlando. 2022. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, agama dan sains. Volume VI.

Hidayat Putra Pratama. 2022. *Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun. Volume 5. Nomor 1

Klaudius Ilkam Hulu. Dalinama Telaumbanua. Fianusman Laia. 2024. *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Putusan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Panah Keadilan. Volume 3. Nomor 2.

Leona Putri Sari. Arif Wibowo. 2023. *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Jurnal Penelitian Multi Disipilin. Volume 2. Nomor 1.

Muhammad Suhardi. 2023. *Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mengeluarkan Keputusan Yang Menimbulkan Kerugian*. Volume 13. Nomor 2.

Ridwan. Despan Heryansyah. Dian Kus Pratiwi. 2018. *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.2, Nomor 25.

Safi. 2010. *Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai sarana mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Volume 3. Nomor 2.

Valentino Dandi Sukmanagara. Lapon Tukan Leonard. Kartika Widya Utama. 2021. *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura No: 11/G/2017/PTUN.JPR)*. Diponegoro Law Jurnal. Volume 10.

SKRIPSI

Muh Ikhsan Ramadhani. 2023. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara atas Tindakan Faktual*. Skripsi. Universitas Hasanuddin

Mhd Syahrofi Manurung. 2020. *Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Karolus Geleuk Sengadji. 2023. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan